

PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SERTA KEMISKINAN DI KABUPATEN BIMA

M. Rimawan*, Fenny Aryani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

*rimawan111@gmail.com

Abstrak

Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut memiliki peran penting dalam penciptaan kesejahteraan, peningkatan taraf hidup dan tersedianya lapangan kerja. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan dana stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dan membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun alokasi dana desa dalam kurun waktu empat tahun ini cenderung meningkat dan sangat tajam di tahun 2015-2018, namun tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima cenderung fluktuatif, indeks pembangunan manusia meningkat dan kemiskinan mengalami fluktuatif. Dengan demikian tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di Kabupaten Bima. Metode analisis data yang digunakan adalah SEM-PLS dengan bantuan alat uji statistik menggunakan WARP PLS 3.0. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Sehingga diharapkan kepada pemerintah desa lebih meningkatkan program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan

Kata Kunci: alokasi dana desa, indeks pertumbuhan manusia, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi

Abstract

The Economic performance of a region can be seen from the Gross Regional Domestic Revenue or economic growth. The economic growth of the regions has an important role in creating prosperity, increasing the standard of living and providing employment. Village fund Allocation is as a stimulant fund to encourage and finance village government programs that are supported by community participation in carrying out government activities, development and community empowerment. Although Village fund Allocation in the past 5 years has tends to fluctuate, human development index increases and poverty fluctuates. Thus the main objective of this study is to analyze the impact of Village fund Allocation on economic growth. Human development index and Poverty in Bima Regency. The Analytical method used is a quantitative research method using the Warp PLS statistical tool. The result of analysis show that the variable Allocation of Village funds has a positive effect on economic growth, the human development index while does not affect poverty

Keywords: Village Funds, Human development Index, Poverty, Economic Growth

Pendahuluan

Perkembangan dunia akuntansi sektor public di Indonesia semakin pesat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan daya saing disetiap pemerintah daerah dan desa. Desa adalah bagian wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang merupakan tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan entuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kota/kabupaten menurut UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Strategi kebijakan pembangunan Indonesia adalah meningkatkan pemerataan pembangunan yang beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan lintas sektoral terutama di daerah pedesaan. Hal ini telah membuka peluang bagi pemerintah daerah dan desa untuk bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing kepentingan daerah. Otonomi daerah adalah solusi dalam menangani berbagai masalah yang terjadi karena masalah disparitas (ketimpangan) pembangunan baik antara pusat dan daerah (kuncorojati, 2017) dan (badrudin, 2015). Kesenjangan ini terjadi akibat dari pembangunan yang tidak merata yang mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Aziz, 2016). Statistik menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di yang terjadi di kabupaten bima mengalami penurunan dari tahun ketahun tahun 2015 sebesar 16.10 % mengalami penurunan ditahun 2016 sebesar 15.31% sedangkan ditahun 2017 dan 2018 turun menjadi sebesar 15.10% dan 15.01%. masalahnya bukan hanya tingkat kemiskinan, namun tingkat disparitas dalam pembangunan manusia di kabupaten bima relative tinggi, Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bima selama 4 tahun terakhir adalah 2015 sebesar 63.46, tahun 2016 64.15%, 2017 sebesar 65.01% dan tahun 2018 sebesar 65.46 % ini menunjukkan IPM Kabupaten Bima dari sedang ke tinggi. Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bima mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain belum mampu mengatasi tingkat kesenjangan pemangunan antra satu daerah dengan daerah yang lain, baik antara kabupaten dan kota dalam satu provinsi.

Pertumbuhan Ekonomi harus dapat secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin (ginting dan dewi, 2013) yang selanjutnya dapat mengakomodasi kesenjangan rendah atau distribusi pendapatan yang sama. Pertumbuhan ekonomi adalah prosesmeningkatnya output perkapita jangka panjang (badrudin, Ekonomika otonomi daerah, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang berlangsung di kabupaten bima dalam periode tersebut adalah pembangunan eksklusif, tapi tidak inklusif.

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP, 2009), pengembangan beberapa negara adalah pembangunan eksklusif. Ini berarti bahwa pembangunan hanya memperhitungkan aspek pertumbuhan tetapi tidak memperhitungkan penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan lingkungan sehingga terkadang ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, serta kerusakan lingkungan seperti hasil dari proses pengembangan. Lin dan Liu (2000) melakukan penelitian di Tiongkok, menemukan bukti bahwa faktor kunci pertumbuhan ekonomi di Tiongkok adalah reformasi fiskal sejalan dengan reformasi pedesaan. Studi ini berbanding lurus dengan penelitian Lai (1994) di Taiwan bahwa keberhasilan strategi pembangunan di Taiwan sangat ditentukan oleh pengembangan sektor industri di daerah pedesaan. Untuk mencapai pertumbuhan yang adil dan pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia harus dimulai dari pedesaan. Ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, hampir semua orang Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Kedua, meskipun desentralisasi fiskal telah dimulai sejak tahun 2001, data menunjukkan bahwa hampir beberapa masalah mendasar di negara ini, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, sarana dan prasarana yang tidak memadai, ada di wilayah desa. Oleh karena itu, sesegera mungkin, perlu dibangun reformasi pemahaman bahwa wilayah desa memiliki posisi strategis di Republik Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika daerah desa maju maka daerah dan negara harus sama. Dengan demikian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pedesaan adalah ujung tombak pembangunan regional dan nasional (Prasetyo, 2012).

Pembangunan desa merupakan sebagai gerakan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan yang dilandasi kesadaran untuk meningkatkan kehidupannya yang lebih baik dan kehidupan yang Layak. Masyarakat atau penduduk Indonesia sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan atau pelososok. Dengan jumlah penduduk dan keadaan alam yang meningkat dan berlimpah pemerintah desa akan mendapatkan Aset melalui program pemerintah yaitu Dana Alokasi Desa (ADD) berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan wewenangnya dalam mengatur dan mengelola pemerintahan dan kepentingan rakyat, desa-desa membutuhkan sumber pendapatan. Pendapatan desa adalah

sumber daya vital untuk administrasi desa. Filosofi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan layanan publik di desa, mempromosikan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan antara pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Keberadaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah karena pemerintah desa mendapat alokasi dana yang akan digunakan untuk biaya modal pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bima memiliki 18 kecamatan dan 191 desa, wilayah yang strategis, sumber daya alam yang melimpah dan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian disektor pertanian Pengalokasian dana desa yang ada di kabupaten bima sudah dimulai dari tahun 2015, alokasi dana desa dimaksudkan sebagai bantuan stimulus atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa. Dana desa ditansfer melalui APBD kabupaten dan Kota untuk selanjutnya ditransfer APBDes. Jumlah alokasi dana desa yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Bima adalah jumlah yang sangat besar ini bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel.1 alokasi dana desa kabupaten bima
(dalam jutaan rupiah)**

Tahun	Dana Desa
2015	54.246.373
2016	121.722.136
2017	155.258.138
2018	156.526.147

Sumber: BPS kabupaten bima

Data diatas mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun ini menunjukkan keseriusan pemerintahan untuk membangun desa. Dengan adanya alokasi dana desa ini aparat desa diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan.

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya dalam pembangunan fisik dalam bentuk sarana dan infrastruktur (Nugroho, 2012). Pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat menggunakan belanja modal. Belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kegiatan ini menghasilkan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, 2017). Belanja modal dan alokasi dana desa memiliki sumber pendanaan yang berbeda tetapi keduanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penelitian Prasetyo (2012) yang meneliti Dampak Alokasi Dana Desa di Era Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi daerah, mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto sektor pertanian. Dalam studi ini implementasi VFA diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, hanya 60% pemerintah daerah di Indonesia yang menerapkannya.

Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam mewujudkan hasil pembangunan melalui alokasi dana desa yang merupakan pembangunan inklusif, karena, dalam pembangunan inklusif, tujuan pembangunan bermakna dengan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berorientasi pada penciptaan lapangan

kerja sehingga mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi kaum miskin, dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam perumusan kebijakan pelaksanaan alokasi dana desa dan Pengeluaran Modal dalam rangka mendukung Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Bima dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Ramadona (2016). Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara principal agent.

Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa disebutkan bahwa Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Alokasi dana desa adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mengimplementasikan pembangunan yang dikelola langsung oleh desa dan masyarakat (Prasetyo, 2012). Belanja modal adalah komponen belanja pembangunan untuk belanja daerah. Pengeluaran modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan bagi masyarakat. Kegiatan ini menghasilkan pembangunan berbagai fasilitas umum seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah dan rumah sakit, pasar dan fasilitas umum lainnya yang akan digunakan oleh masyarakat (Badrudin, 2017).

Menurut Kuznets dalam Badrudin (2017, hal. 140) pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya. Djojohadikusumo dalam Badrudin (2017, hal. 121) juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses meningkatkan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi suatu ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional.

Kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan kurang berkembang, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan mereka untuk bekerja dan memiliki akses terbatas ke kegiatan ekonomi sehingga mereka tertinggal oleh masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks untuk menjelaskan bagaimana orang dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh penghasilan, kesehatan, dan pendidikan. Belanja modal penting untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, tetapi belanja modal bukanlah akhir dari pembangunan manusia. Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan bagaimana orang menggunakan kemampuan ini.

Menurut Badrudin (2011), EG akan mempengaruhi kekayaan masyarakat. Peningkatan pendapatan di masyarakat ditandai dengan meningkatnya alokasi pendapatan

untuk konsumsi primer, sekunder, dan tersier. Menurut Prasetyo (2012), model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia adalah model ekonomi yang berfokus pada merangsang peningkatan pendapatan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan sektor ekonomi yang efisien dan dinamis tanpa memperhitungkan dampak negatif pada masyarakat luas seperti menipisnya sumber daya alam. Kerusakan sumber daya dan lingkungan. Mempertimbangkan hal ini, maka perlu memiliki perencanaan pembangunan yang tepat dan memberikan perhatian pada kapasitas lingkungan.

Alokasi dana desa adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diberikan kepada desa untuk membangun desa. Semakin tinggi dana desa yang disediakan, semakin tinggi tingkat pembangunan desa. Peningkatan tingkat perkembangan ini dapat meningkatkan ekonomi kegiatan masyarakat kabupaten bima. Oleh karena itu, semakin tinggi dana desa, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapat ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa adalah alokasi anggaran untuk desa yang berasal dari anggaran pusat yang dilakukan secara adil dan merata membuat program berbasis desa efektif. Prasetyo (2012) membuktikan bahwa alokasi dana desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi regional dan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik bruto sektor pertanian. Sementara Ashari (2013) membuktikan peran alokasi dana desa dalam pengembangan infrastruktur fisik di Desa Kelinjau Ilir masih sedikit. Ini menunjukkan, ketika alokasi dana desa dialokasikan dengan benar, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima

Kesejahteraan masyarakat tercermin dalam kondisi kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Soesilowati, 2005). Indeks pembangunan manusia adalah indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka panjang untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas kehidupan manusia. Pada 2015, IPM kabupaten bima tahun 2015 mencapai 63.46. Ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia Indonesia telah meningkat tetapi masih dalam status "sedang". Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Karena itu, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Studi Sasana (2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat di kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Prasetyo (2012) membuktikan bahwa alokasi dana desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi regional dan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik bruto sektor pertanian. Sementara Ashari (2013) membuktikan peran alokasi dana desa dalam pengembangan infrastruktur fisik di Desa Kelinjau Ilir masih sedikit. Ini menunjukkan, ketika alokasi dana desa dialokasikan dengan benar, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima

Menurut Ginting dan Dewi (2013), kemiskinan adalah situasi di mana pendapatan rumah tangga terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka kesulitan membeli makanan, rumah, dan pakaian yang dibutuhkan setiap hari. Situasi ini dipacu oleh ketimpangan pendapatan, atau dengan kata lain kemiskinan ini terjadi karena didorong oleh ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu negara. Dengan demikian, pengurangan kemiskinan adalah salah satu tujuan pembangunan. Prasetyo (2012) membuktikan bahwa alokasi dana desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi regional dan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik bruto sektor pertanian.

Sementara Ashari (2013) membuktikan peran alokasi dana desa dalam pengembangan infrastruktur fisik di Desa Kelinjau Ilir masih sedikit. Ini menunjukkan, ketika alokasi dana desa dialokasikan dengan benar, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mengurangi kemiskinan Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Alokasi Dana Desa Berpengaruh Positif Terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima

Metode

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan variabel penelitian yaitu alokasi dana desa, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan dokumen, data diperoleh dari website BPS Kabupaten Bima dan website resmi Kementerian desa. sampel dalam penelitian ini adalah 4 tahun dari 2015 – 2018, teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Alat Statistik yang digunakan adalah SEM-PLS dengan uji statistic menggunakan WARP PLS 3.0 (Partial Least Square).

Hasil dan Pembahasan

Penilaian outer Model

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian outer model. Outer model menentukan spesifikasi hubungan antara konstruk dan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lain. Konstruk endogen adalah efek dari konstruk eksogen. Penelitian outer model meliputi uji validitas dan reabilitas karena data yang digunakan adalah data terukur.

Perhitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)

Model struktural atau *Inner Model* pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi dan teori tersebut disebut *Fit* apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai *Goodness of Fit* didasarkan pada hasil SEM WarpPLS. Hasil pengujian model *Goodness of fit* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengujian SEM

Variabel	R- square
Alokasi dana desa (ADD)	-
Pertumbuhan ekonomi (PE)	1,000
Indeks pembangunan manusia (IPM)	0,958
Kemiskinan (KM)	0.994

Sumber: Hasil output PLS

Goodness of fit inner model pada analisis PLS menggunakan ukuran *Stone-Geisser Q-Square test* yang berupa nilai *Q-square predictive relevance* dihitung berdasarkan nilai R² masing-masing variabel endogen, yaitu variabel belanja modal diperoleh nilai RPE² sebesar 1.000 ; variabel Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai RIPM² sebesar 0,958; RKM² sebesar 0,994 dengan demikian nilai *Q-square predictive relevance* sebesar:

$$\begin{aligned} Q_2 &= 1 - (1 - RPE^2) (1 - RIPM^2) (1 - RKM^2) \\ &= 1 - (1 - 1,000) (1 - 0,958) (1 - 0,994) \\ &= 1 - (0) (0,042) (0,006) \\ &= 1 - 0,00025 \\ &= 0,99 \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance*, menurut Abdillah dan Jogiyanto (2009) jika hasil menunjukkan 0.02 (kecil), 0.15 (sedang), dan > 0.35 (besar). Dalam pengujian yang dilakukan untuk penelitian ini menunjukkan hasil sebesar

0.99 atau 99% sehingga model dikatakan memiliki nilai prediktif yang kuat atau besar karena variabel-variabel dalam model yang meliputi variabel Alokasi dana desa, mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan Manusia dan kemiskinan sebesar 99% atau 0.99 sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 3 Nilai Goodness of Fit Model

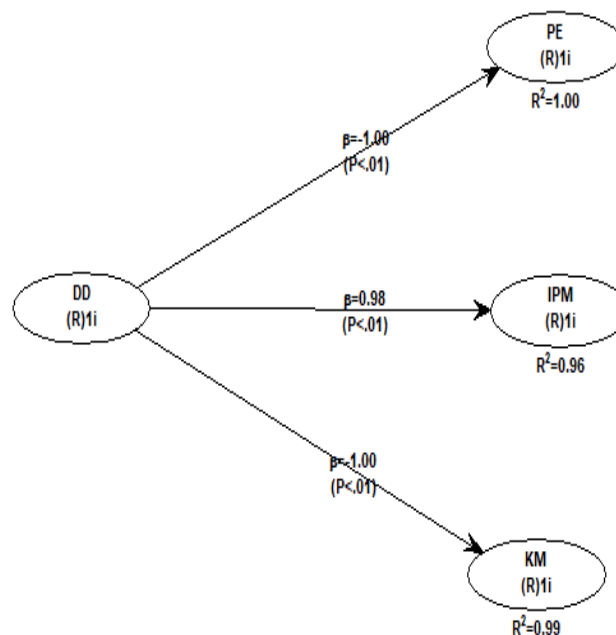
Hasil	P – Value	Kriteria	Keterangan
APC = 0,992	P< 0,001	Good if P < 0.05	Diterima
ARS = 0,984	P< 0,001	Good if P < 0.05	Diterima
AVIF = 1,056		P< 5	Diterima

Sumber: Hasil output PLS

Interpretasi indikator model fit dalam penelitian ini memenuhi kriteria nilai Goodness of Fit Model sehingga model penelitian ini dapat digunakan untuk membandingkan beberapa dan menguji hipotesis.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable eksogen terhadap variable endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa sedangkan variabel endogen adalah pertumbuhan ekonomi, indeks pembanguna manusia dan kemiskinan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai beta (β) antar variabel dan *p – value*. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan warp pls 3.0 ditunjukkan sebagai berikut



Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai keofisian β sebesar 1,00 dengan *p-value* <0,01 yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima sudah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prasetio (2012), Afrilianto (2017) dan Ashari (2013) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar 0.98 (positif) dengan $p\text{-value} < 0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten bima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Afrilianto (2017) dan Ashari (2013) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia

Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bima

Berdasarkan hasil pengujian bahwa Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien β sebesar -1,00 (negatif) dengan $p\text{-value} < 0,01$ yang lebih kecil dari alfa (α) 0,05 oleh karena itu hipotesis alokasi dana desa terhadap kemiskinan di kabupaten bima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di kabupaten bima belum mampu mengurangi kemiskinan di kabupaten bima, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dianti et al., 2018) yang menyatakan bahwa alokasi dana desa tidak dapat mengurangi kemiskinan dan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari (2013) yang mengatakan bahwa alokasi dana desa bisa mengurangi kemiskinan

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Alokasi dana desa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa desa sudah mampu menggunakan alokasi dana desa secara efektif untuk mendukung pembangunan desa serta alokasi dana desa sudah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia ini bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur desa, lembaga pendidikan serta layanan kesehatan yang sudah ada di setiap desa . tetapi Alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan alokasi dana desa belum mampu mengurangi kemiskinan dikarenakan program yang dilakukan oleh pemerintah desa masih mengedepankan pembangunan infrastruktur tidak memperbanyak program mengenai pemberdayaan masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi oleh pemerintah pusat terkait alokasi dana desa sehingga alokasi dana desa dapat berjalan dengan efektif. Evaluasi dalam hal ini bisa dilakukan seperti sosialisasi tentang peraturan pemerintah, pelatihan sumber daya manusia. Sehingga dapat mengurangi penggunaan dana di luar prioritas dan potensi penyalahgunaan dana desa. Implementasi dana desa yang efektif dan efisien akan mendukung pembangunan desa sehingga kesejahteraan akan meningkat dan kemiskinan akan berkurang.

Dalam penelitian ini ada batasan yaitu 1) penelitian ini masih meneliti secara general diharapkan peneliti selanjutnya untuk meneliti secara detail perdesa. 2) menambahkan indikator lain seperti variabel pengangguran dan indeks gini setiap kabupaten. 3) peraturan pemerintah harus jelas sehingga pemerintah desa bisa memahami tentang alokasi dana desa.

Daftar Rujukan

- Afrilianto. 2017. *analisis dampak alokasi desa terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bogor*. Jurnal ipb.
- Ashari, N. (2013). Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kelinjau Kecamatan Muara Ancong Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1, 1135-1144.
[Retrieved from: https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=778#](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=778#)
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Badrudin, R. (2011). Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare. *Emerging Market*, 3, 211-223. Retrieved from: <https://journal.uii.ac.id/JEP/article/view/2974>
- Badrudin, R. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Surabaya: Universitas Brawijaya.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah* (2 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). *The Effect of District Own-Source Revenue and Balance Fund on Public Welfare by Capital Expenditure and Economic Growth as an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta*. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(1), 54-59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>
- Dianti et,al .2018. *Pengaruh alokasi dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud*. *Jurnal berkala ilmiah efisiensi*, vol 18 no 04 tahun 2018.
- Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0*, Edisi 2. Universitas Diponegoro, 2015.
- Lai, C. (1994). Market structure and Inter-industry Profit Differences in Taiwan. *Pakistan Development Review*, 33(2), 147-163. <https://doi.org/10.30541/v33i2pp.147-163>
- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China, in *Economic. Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1-21. <https://doi.org/10.1086/452488>
- Manek, M. & Badrudin, R. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81-98. <http://dx.doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011*.
- Prasetyo, E. P. (2012). Dampak Alokasi Dana Desa pada Era Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Ekonomi Pembangunan*, 16, 50 -69. <https://doi.org/10.23917/jep.v7i2.3985>
- Siregar, B., & Badrudin, R. (2017). Degree of Fiscal Decentralization and Flypaper Effect: Evidence from Indonesia. *Advanced Science Letters*. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9013-9019. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014>
- Website www.kemendes.go.id.
- Website www.djpk.depkeu.go.id.
- Website www.bimakab.go.id
- Website www.bimakab.bps.go.id